

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LALU  
LINTAS BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW  
ENFORCEMENT (ETLE)* DI KOTA PALEMBANG**  
**(Studi Kasus di Jalan POM IX Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**Oleh :**

**AGUNG OSAMA DILLAH**

**NIM. 07011282126103**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN**

**2025**

## **HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

### **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DI KOTA PALEMBANG**

**(Studi Kasus di Jalan POM IX Kota Palembang)**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam  
Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

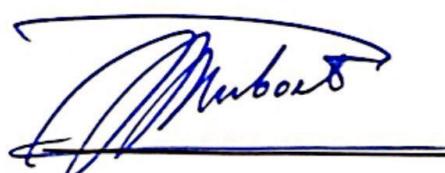
**AGUNG OSAMA DILLAH**

**NIM.07011282126103**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, tgl. Mei 2025**

**Pembimbing**

**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS  
BERBASIS ETLE DI KOTA PALEMBANG**  
**(Studi Kasus di Jalan POM IX Kota Palembang)**

**Skripsi**

**Oleh :**  
**AGUNG OSAMA DILLAH**  
**07011282126103**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 19 Mei 2025

Pembimbing :

Tanda Tangan

1. Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
196911101994011001 (NIP)

Penguji :

Tanda Tangan

1. Annada Nasyaya S.I.P., M.Si  
198809062019032016 (NIP)

2. Lisa Mandasari, S.I.P., M.Si  
198603272023212029 (NIP)



Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP.196601221990031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## **LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Osama Dillah

Nim : 07011282126103

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PALEMBANG (Studi Kasus di Jalan POM IX Kota Palembang)”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Yang Membuat Peryataan

Indralaya, 5 Mei 2025



Agung Osama Dillah  
07011282126103

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*Everyone has their own part*

### **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan

kepada

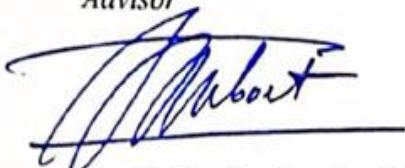
1. Kedua orang tua yang saya cintai.
2. Kedua saudari saya yang saya sayangi.
3. Seluruh keluarga saya yang telah menjadi rumah bagi saya.
4. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fisip Unsri.
5. Kepada seluruh sahabat yang selalu menemani saya
6. Diri sendiri yang sudah kuat untuk tetap bertahan sampai saat ini.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of traffic law enforcement policy through the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system in Palembang City, focusing on the POM IX Street area. The ETLE system is expected to reduce traffic violations through a more transparent and accountable technology-based enforcement mechanism. However, its implementation faces several challenges, such as limited infrastructure, insufficient public outreach, and low levels of compliance. This research uses a qualitative approach and is based on Duncan's policy effectiveness theory, which emphasizes three aspects: Goal Achievement, Integration, and Adaptation. The findings reveal that while ETLE has made progress in detecting violations, its overall effectiveness remains suboptimal due to limited legal awareness among the public and technical challenges in the field. Therefore, improvements in infrastructure, public education, and policy integration are essential to fully realize the objectives of the ETLE system.*

**Keywords:** Policy Effectiveness, ETLE, Traffic, Law Enforcement, Palembang

*Advisor*



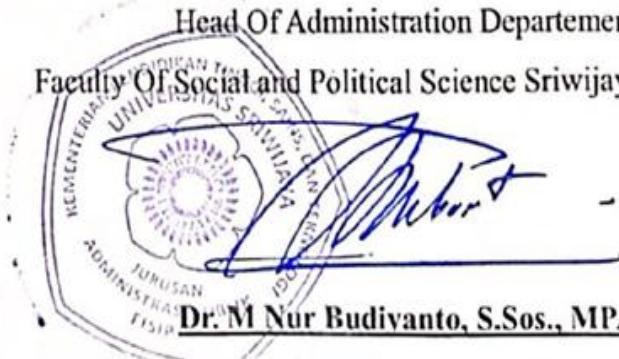
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

Indralaya, 5 Mei 2025

Head Of Administration Departement

Faculty Of Social and Political Science Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

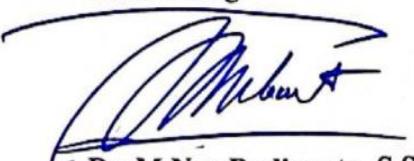
NIP. 196911101994011001

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penegakan hukum lalu lintas berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Palembang, dengan fokus pada Jalan POM IX. Sistem ETLE diharapkan mampu mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme penindakan berbasis teknologi yang lebih transparan dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori efektivitas kebijakan dari Duncan, yang mencakup tiga aspek: Goal Achievement, Integration, dan Adaptation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ETLE telah menunjukkan kemajuan dalam mendeteksi pelanggaran, efektivitasnya masih belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta tantangan teknis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dari sisi infrastruktur, edukasi, serta integrasi kebijakan agar tujuan dari ETLE dapat tercapai secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Efektivitas Kebijakan, ETLE, Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Palembang

Pembimbing



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

Indralaya, 5 Mei 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BERBASIS Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) DI KOTA PALEMBANG (Studi Kasus di Jalan POM IX Kota Palembang), sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ayah dan Mama saya, Muhammad dan Nurbaiti, serta kedua saudari saya, Marini dan Septi yang sudah menjadi rumah bagi penulis, dan juga tak lupa seluruh keluarga besar penulis yang tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang sepanjang perjalanan ini.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan dedikasi yang diberikan menjadi pegangan penting dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan ini sangat banyak kendala dan rintangan yang terjadi, namun sangat banyak dukungan dan motivasi yang penulis dapat dari banyak pihak, maka dari itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus.
3. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku dosen pembimbing dan ketua jurusan program studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Seluruh Dosen, Pimpinan, Staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
5. Kepada Muhammad dan Nurbaiti selaku kedua orang tua saya yang tidak henti hentinya mendoakan penulis agar selalu dimudahkan jalannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Marini dan Septi selaku saudari saya yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar yang sudah menjadi rumah tempat berpulang bagi penulis ketika Lelah.
8. Bapak Kukuh dan Ibu Lastari dan seluruh petugas Ditlantas yang benar benar membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan guna menunjang penulisan ini.
9. Seluruh informan yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi untuk penulis guna menunjang penulisan ini.

10. Gisellia Putri, selaku *one call away* bagi penulis, yang selalu ada bagi penulis, yang selalu inisiatif membantu memberikan saran hingga dukungan sehingga penulis bisa sampai sejauh ini.
11. Seluruh sahabat yang selalu ada disisi penulis yang selalu hadir memberi semangat, tawa, dan kebersamaan di setiap langkah proses ini. Dukungan sederhana yang kalian berikan telah menjadi kekuatan besar yang membantu penulis tetap bertahan dan terus maju hingga titik akhir ini.
12. Mba Ita selaku admin jurusan yang benar benar membantu penulis dalam administrasi kampus.
13. Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada diri sendiri yang sudah kuat bertahan sampai pada titik ini.

Tentunya, sebagai seorang manusia, penulis sangat sadar sangat banyak kekurangan yang ada di Skripsi ini, maka dari itu, penulis ingin meminta maaf yang sebesar besarnya atas kesalahan ataupu kekurangan yang penulis buat. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun.

Saya Agung Osama Dillah selaku penulis, berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMPAHAN .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I .....	15
PENDAHULUAN.....	15
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>15</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>24</b>
<b>1.3 Tujuan.....</b>	<b>24</b>
<b>1.4 Manfaat .....</b>	<b>25</b>
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>2.2 Efektivitas.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>2.3 Kebijakan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>2.4 Efektivitas Kebijakan.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>2.4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan..</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2.4.2 Efektivitas Kebijakan Dalam Implementasi ETLE di Kota Palembang .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2.5 Penegakan Hukum Lalu Lintas .....</b>	Error! Bookmark not defined.

<b>2.6 Electronic Traffic Law Enforcemnet (ETLE) ....</b>	Error! Bookmark not defined.
2.6.1 Cara kerja ETLE .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.6.2 Tahapan Pembayaran Denda Tilang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2.7 Penelitian Terdahulu .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>2.8 Teori Teori Efektivitas.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>2.9 Teori yang Digunakan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>2.10 Kerangka Berpikir .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>3.2 Lokasi Penelitian .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>3.3 Definsi Konseptual.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>3.4 Fokus Penelitian.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>3.5 Jenis dan Sumber Data .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>3.6 Informan Penelitian.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>3.7 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	Error! Bookmark not defined.
3.7.1 Wawancara.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7.2 Observasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7.3 Dokumentasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.8 Analisis Data.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>3.9 Teknik Keabsahan Data .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.1 DESKRIPSI INSTANSI PENELITIAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Letak Geografis Kantor Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Selatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.2 Tugas dan Fungsi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.3 VISI MISI DITLANTAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.4 Struktur Organisasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.2 INFORMAN PENELITIAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>4.3 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 GOAL ACHIEVMENT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.2 INTEGRATION.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4.3.3 ADAPTATION.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.4 Tantangan dan Hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan ETLE .....	Error! Bookmark not defined.
BAB 5.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>5.2 Saran.....</b>	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Saran Teoritis .....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Pustaka .....	27
Lampiran .....	Error! Bookmark not defined.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2. Fokus Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. Informan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. Informan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 5. Matriks Hasil Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Statistik Pengguna Kendaraan Kota Palembang .....	19
Gambar 2. Sosialisasi ETLE Melalui Youtube .....	19
Gambar 3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Sebelum dan Sesudah Diberlakukan ETLE .....	21
Gambar 4. Kerangka Berpikir.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 5. Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 6. Lokasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 7. Ditlantas Polda Sumatera Selatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 8. Struktur Organisasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 9. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 10. Proses Wawancara.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 11. Proses Wawancara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 12. Masyarakat Yang Menutup Plat Nomor Kendaraan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lalu lintas yang tertib dan aman merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan sistem transportasi yang efektif di suatu wilayah. Kota Palembang, sebagai salah satu pusat ekonomi dan mobilitas di Sumatera Selatan, menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum lalu lintas, terutama dalam mengatasi pelanggaran yang terus meningkat. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah *ETLE*, sebuah sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk menegakkan hukum lalu lintas secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Kebijakan ini sendiri sudah mulai di berlakukan di Kota Palembang pada tahun 2022. (Inge, 2022)

Landasan hukum utama yang menjadi dasar penerapan ETLE adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini memberikan kerangka regulasi bagi pengelolaan lalu lintas, termasuk pemanfaatan teknologi dalam menegakkan aturan berkendara di jalan raya. Dalam Pasal 272 UU LLAJ, disebutkan bahwa peralatan elektronik dapat digunakan sebagai perangkat pendukung dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, dan hasil rekamannya dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini menjadi dasar bagi kepolisian dalam menerapkan sistem ETLE sebagai pengganti mekanisme tilang manual yang sebelumnya rawan terhadap penyimpangan, seperti pungutan liar dan negosiasi ilegal di lapangan.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penegakan hukum lalu lintas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi ini mengatur mekanisme pemeriksaan kendaraan serta prosedur penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan pengendara. Salah satu poin utama dalam peraturan ini adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan teknologi dalam mendukung sistem penegakan aturan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan perkembangan sistem tilang elektronik atau ETLE yang diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kota Palembang.(Halid et al., 2024)

Dalam implementasi di lapangan, PP Nomor 80 Tahun 2012 mengatur bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung oleh petugas di jalan atau melalui alat elektronik seperti kamera pengawas (CCTV) yang mampu mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Berdasarkan Pasal 23 dalam peraturan ini, hasil rekaman peralatan elektronik dapat digunakan sebagai dasar penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, sehingga memungkinkan sistem ETLE berjalan secara sah dan efektif.(Halid et al., 2024)

Dalam implementasinya, kebijakan ETLE di Kota Palembang masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitasnya sebagai sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi Meskipun kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pengendara dan mengurangi pelanggaran lalu lintas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi. (Maharani & Mawardah, 2023)

Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jumlah kamera ETLE yang masih terbatas di beberapa titik strategis di Kota Palembang Hal ini menyebabkan sistem hanya dapat mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, sementara pelanggaran di daerah lain, terutama di pinggiran kota, masih sulit terdeteksi. Ketimpangan ini menciptakan celah bagi pengendara untuk menghindari tilang elektronik dengan memilih rute alternatif yang tidak terjangkau oleh sistem ETLE. (Susilo, 2022).

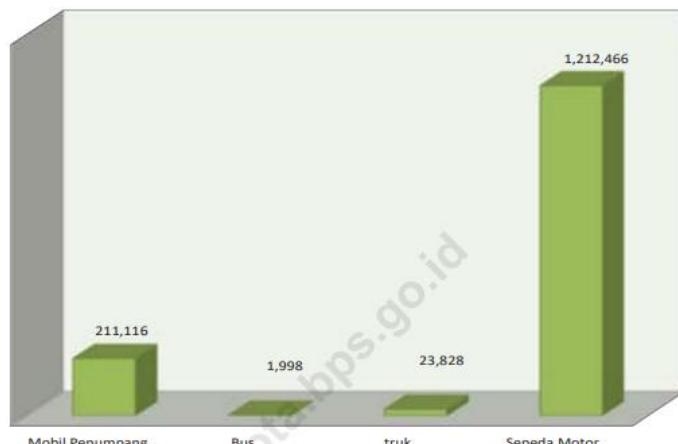
Pada tahun 2023, kota Palembang telah menambahkan infrastruktur kamera *ETLE* yang awalnya berjumlah sembilan kamera ditambah menjadi tujuh seningga menjadi 16 kamera yang tersebar di lokasi strategis untuk mendukung penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di berbagai titik rawan pelanggaran dan kepadatan lalu lintas, di antaranya Jalan Kolonel H. Burlian Km 8,5, Jalan R. Soekamto, Jalan Jenderal Sudirman di sekitar Taman Makam Pahlawan (TMP). Simpang RK Charitas, Jalan Sudirman depan Pasar Cinde, dan Jalan Ahmad Yani, Plaju Lampu Merah Plaju-Kertapati, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Gubernur Hasyim di depan Bank Sumsel Babel Jakabaring, Jalan Demang Lebar Daun di depan SPBU Demang, Jalan Soekarno-Hatta di depan SD Palm Kids, Jalan Soekarno-Hatta di persimpangan Springhill, Jalan Ki Ranggo Wirosantiko (rumah dinas Walikota Palembang), Jalan Sriwijaya Raya di Fly Over Musi II, dan Jalan KH A Rasyid dekat simpang Tugu KB.(Saputra, 2023)

Namun, meskipun teknologi ETLE diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, penerapan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti dalam aspek penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap

sistem ETLE. Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme tilang elektronik, prosedur pembayaran denda, serta hak-hak pelanggar menyebabkan kebingungan di kalangan Masyarakat. Tidak sedikit pengendara yang masih meragukan validitas tilang elektronik, sehingga muncul resistensi terhadap kebijakan ini. Terlebih dari observasi secara tidak langsung dari penulis ketika berkendara di jalan POM IX kota Palembang, penulis menemukan bahwa beberapa kasus juga menunjukkan bahwa pelanggar mencoba menghindari tilang dengan cara menutupi nomor plat kendaraan mereka dengan stiker, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan berlalu lintas masyarakat masih rendah. Terlebih lagi, di kota Palembang, jumlah kendaraan yang ada sangatlah tinggi, sehingga menimbulkan berbagai masalah.(Maharani & Mawardah, 2023)

Berdasarkan data resmi yang diambil dari website Badan Statistik Kota Palembang peningkatan jumlah kendaraan khususnya motor sangat tinggi. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menjadi penyebab utama kemacetan, kecelakaan, hingga pelanggaran lalu lintas.

**Gambar 1. Statistik Pengguna Kendaraan Kota Palembang**



Sumber/Source: Kantor Samsat Kota Palembang/ Samsat Office of Palembang Municipality

*Sumber: Badan Statistik Kota Palembang*

Ditinjau dari volume kendaraan bermotor yang ada di kota palembang, sepeda motor merupakan kendaraan terbanyak yang dimiliki yaitu ada sebanyak 1.212.466 unit, kemudian disusul mobil penumpang 211.116 unit, mobil barang sebanyak 23.823 unit dan bus 1.998 unit. Sementara itu, kapasitas institusi penegak hukum sering kali tidak memadai untuk menangani volume pelanggaran yang besar, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan mekanisme penegakan hukum yang lebih cepat, akurat, dan mampu mengurangi beban administrasi manual.

**Gambar 2. Sosialisasi ETLE Melalui Youtube**



*Sumber: Penulis*

Kurangnya penyebaran sosialisasi mengenai ETLE di Kota Palembang menjadi salah satu tantangan bagi Ditlantas selaku actor dalam kebijakan ini, meskipun sistem ini telah diterapkan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh Ditlantas Polda Sumsel sejak pertengahan 2021 melalui media massa hingga sosial media seperti youtube, namun upaya ini masih terbatas dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi jika melihat di chanel youtube Polantas Sumsel, dapat dilihat jika jangkauan sosialisasi melalui Youtube tersebut terbilang sedikit dalam menjangkau masyarakat. Pada sosialisasi ini hanya mendapat 558 penonton, jumlah yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan pengguna jalan di kota Palembang. Akibatnya, masih banyak pengendara yang masih menganggap kamera ETLE hanya sebagai pajangan dan tidak memahami bahwa pelanggaran yang terekam benar-benar akan dikenakan sanksi tilang. (Sasongko, 2020)

**Gambar 3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Sebelum dan Sesudah Diberlakukan ETLE**



*Sumber: Ditlantas*

Mengacu pada data ini, dapat dilihat bahwa terjadi pelonjakan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi setelah diberlakukan ETLE, Dimana pada tahun 2022 terdapat 15.572 pelanggar, berbeda jauh dengan tahun 2021 yang hanya Cuma 2682 pelanggar. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ETLE sudah diberlakukan, pelanggaran yang dilakukan Masyarakat masih tetap terjadi karena kurang tegasnya penindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh Ditlantas, tidak semua pelanggar yang melanggar dikenakan sanksi pelanggaran karena keterbatasan sistem dalam menangani ribuan kasus.

Berdasarkan data dalam diagram, terlihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang diawasi melalui sistem ETLE mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pelanggaran yang terekam secara signifikan, yakni dari 2.862 pelanggaran pada tahun 2021 menjadi 15.572 pelanggaran di tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ETLE mulai aktif

diberlakukan dan teknologi pengawasan semakin canggih, kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas belum sepenuhnya terbentuk. Lonjakan pelanggaran ini mengindikasikan bahwa kepatuhan belum tumbuh dari kesadaran hukum yang kuat, melainkan masih bersifat situasional, sehingga efektivitas penegakan hukum melalui ETLE perlu terus diperkuat dengan edukasi, sosialisasi, serta pengawasan yang konsisten dan merata.

Secara teoritis, kebijakan publik harus memenuhi unsur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam konteks penerapan ETLE, masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Kebijakan ETLE dirancang untuk meningkatkan transparansi, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar guna mencegah praktik korupsi, serta menciptakan kepatuhan hukum yang lebih tinggi. Namun, peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang justru menunjukkan adanya masalah dalam efektivitas implementasi kebijakan ini.

Dari sisi teknis dan administratif, proses verifikasi dan penindakan pelanggaran melalui ETLE masih memiliki kendala, seperti ketidaksesuaian data kendaraan dalam sistem dengan pemilik aslinya. Masalah ini kerap terjadi ketika kendaraan yang digunakan telah berpindah tangan, tetapi belum dilakukan balik nama, sehingga surat tilang dikirim ke pemilik lama yang tidak lagi memiliki kendaraan tersebut. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi kurang efektif dan membutuhkan perbaikan dalam sistem integrasi data kendaraan.

Dari sudut pandang administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi dan infrastruktur teknologi yang digunakan, tetapi juga pada faktor koordinasi antarlembaga, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dalam kasus ETLE, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan koordinasi antara kepolisian, serta instansi terkait dalam memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan. Selain itu, aspek sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme ETLE masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak nyata dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, dalam teori administrasi publik, efektivitas kebijakan sering kali dipengaruhi oleh tingkat *policy compliance* atau kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diterapkan. Jika kebijakan tidak didukung oleh kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat, maka efektivitas kebijakan tersebut akan menurun. Dalam konteks ETLE di Kota Palembang, masih banyak ditemukan strategi penghindaran tilang elektronik oleh pengendara, seperti menutupi plat nomor kendaraan, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah.

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan ETLE, baik dari sisi implementasi teknis, efektivitas regulasi, maupun kesiapan masyarakat sebagai aktor utama dalam penegakan hukum lalu lintas. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami hambatan struktural dan sosial yang menyebabkan kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuannya.

Dari latar belakang ini, Maka dari itu, penulis tertarik meneliti kasus yang terjadi di Jalan POM IX kota Palembang, dengan judul **EFEKTIVITAS**

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BERBASIS  
*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DI KOTA  
PALEMBANG (Studi Kasus di Jalan POM IX Kota Palembang)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis tertarik merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas dari penerapan ETLE terhadap menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang, khususnya dijalan POM IX.
2. Tantangan dan hambatan yang terjadi pada kebijakan ETLE

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengalisis efektivitas dari penerapan kebijakan ETLE dalam menegakkan hukum lalu lintas di Kota Palembang, termasuk sejauh mana kebijakan ini efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan ETLE, baik dari segi teknis, regulasi, maupun penerimaan masyarakat terhadap sistem tilang elektronik.
3. Mengidentifikasi respons masyarakat terhadap sistem ETLE, termasuk pemahaman, penerimaan, serta kendala yang dihadapi dalam proses tilang elektronik.

## **1.4 Manfaat**

### a. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan akademik dalam bidang evaluasi kebijakan publik, transportasi, dan penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi.
2. Memberikan kontribusi ilmiah bagi penelitian lebih lanjut terkait digitalisasi dalam sistem penegakan hukum.
3. Menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam kajian penerapan sistem tilang elektronik di Indonesia.

### b. Manfaat Praktis

#### Bagi Pemerintah dan Kepolisian

1. Menyediakan analisis berbasis data mengenai efektivitas dan tantangan dalam penerapan ETLE.
2. Membantu dalam merumuskan kebijakan perbaikan untuk optimalisasi sistem tilang elektronik.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum lalu lintas.

#### Bagi Masyarakat

1. Menyediakan informasi terkait sistem ETLE dan prosedur tilang elektronik, sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jalan.

2. Mendorong kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas melalui sistem tilang yang lebih objektif dan berbasis teknologi.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Farid Azis Windiyastuti, F. (2022). *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang.*
- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE ) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.
- Armala, Y., & Yasir, M. (2022). Penarikan kesimpulan adalah proses mengidentifikasi pola, hubungan, tema, atau temuan utama dari data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Proses ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian serta menghubungkan h. *Hukum*, 5(1), 32–44.  
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/405>
- Basoeki, H. H., Sediati, D. S. R., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2023). *Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan Elektronic Traffic Law Enforcement Electronic (ETLE).*
- Campbell, J. P. (1979). *Defining the concept of organizational effectiveness.*
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.*
- Dicaprio, L., NOva, E., & Kurniawan, I. (2024). Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Padang. In *Lareh Law Review* (Vol. 2, Issue 1).

<https://doi.org/10.25077/ljr.2.1.15-26.2024>

Duncan, W. J. (1989). *Organizational Behavior*.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.

Gazali, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(2), 382.

<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5707>

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (1980). *No Title Organizations: Behavior, Structure, Processes*.

Halid, M. Y., Ralfie Pinasang, & Nachrawy, N. (2024). *TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS*. Volume 13, 05.

Inge, N. (2022). *Tilang Elektronik Diberlakukan di Palembang, Ini Daftar Denda Bagi Pelanggarnya*.

Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742. <https://doi.org/10.33087/jiuj.v22i3.2823>

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Maharani, P., & Mawardah, M. (2023). *EDUKASI PENYADARAN TERTIB BERLALU LINTAS DAN INFORMASI TERKAIT ETLE DIT LANTAS POLDA SUMSEL*. 2(11), 6899–6908.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, A. S. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile di Wilayah Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(3), 20. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358>

Oktara Roberto, & Yandriza. (2023). Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang. *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.2.p.36-44.2023>

Rio Nanda Pratama, & Adianto, A. (2022). Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92–112. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i2.446>

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations (5th ed.)*. New York: Free Press.

Saputra, A. Y. (2023). *Tambah 7 Kamera, Ini 16 Titik Kota Palembang yang Terpantau ETLE*. Kompas.com

Sasongko, J. (2020). *Sosialisasi Tilang Elektronik Masih Kurang, RT/RW Perlu Dilibatkan*. Sonora.com

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susilo, J. (2022). *Melihat kesiapan tilang elektronik di Palembang*. Antaranews.com

Wicaksono, D. A. (2020). Jurnal Recht Vending. *Jurnal Recht VendingMedia Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9, 311–329.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/445>

Abdullah, Farid Azis Windiyastuti, F. (2022). *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang*.

Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE ) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.

Armala, Y., & Yasir, M. (2022). Penarikan kesimpulan adalah proses mengidentifikasi pola, hubungan, tema, atau temuan utama dari data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Proses ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian serta menghubungkan h. *Hukum*, 5(1), 32–44.  
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/405>

Basoeki, H. H., Sediati, D. S. R., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2023). *Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan Elektronic Traffic Law Enforcement Electronic (ETLE)*.

Campbell, J. P. (1979). *Defining the concept of organizational effectiveness*.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.

Dicaprio, L., NOva, E., & Kurniawan, I. (2024). Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Padang. In *Lareh Law Review* (Vol. 2, Issue 1).  
<https://doi.org/10.25077/ljr.2.1.15-26.2024>

Duncan, W. J. (1989). *Organizational Behavior*.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.

Gazali, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(2), 382.  
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5707>

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (1980). *No Title Organizations: Behavior, Structure, Processes*.

Halid, M. Y., Ralfie Pinasang, & Nachrawy, N. (2024). *TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS*.

*Volume 13, 05.*

Inge, N. (2022). *Tilang Elektronik Diberlakukan di Palembang, Ini Daftar Denda Bagi Pelanggarnya.*

Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742. <https://doi.org/10.33087/jiuj.v22i3.2823>

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Maharani, P., & Mawardah, M. (2023). *EDUKASI PENYADARAN TERTIB BERLALU LINTAS DAN INFORMASI TERKAIT ETLE DI LANTAS POLDA SUMSEL*. 2(11), 6899–6908.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, A. S. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile di Wilayah Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(3), 20. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358>

Oktara Roberto, & Yandriza. (2023). Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum

- Polresta Padang. *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.2.p.36-44.2023>
- Rio Nanda Pratama, & Adianto, A. (2022). Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92–112. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i2.446>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations (5th ed.)*. New York: Free Press.
- Saputra, A. Y. (2023). *Tambah 7 Kamera, Ini 16 Titik Kota Palembang yang Terpantau ETLE*. Kompas.com
- Sasongko, J. (2020). *Sosialisasi Tilang Elektronik Masih Kurang, RT/RW Perlu Dilibatkan*. Sonora.com
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, J. (2022). *Melihat kesiapan tilang elektronik di Palembang*. Antaranews.com
- Wicaksono, D. A. (2020). Jurnal Recht Vending. *Jurnal Recht VendingMedia Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9, 311–329. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/445>